

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Malang adalah sebuah kota yang merupakan kota ke 2 terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya . Penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun terus bertambah.Hal ini sesuai data yang dikutip melalui situs Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang.Pada tahun 2015 hingga akhir Desember penduduk Kota Malang sebanyak 881.794 jiwa, sedangkan di akhir April 2016 penduduk Kota Malang sebanyak 887.443 jiwa.

Kota Malang sendiri di juluki sebagai kota pendidikan, karena memiliki perguruan tinggi unggulan seperti Universitas Merdeka Malang dan Universitas Brawijaya yang merupakan perguruan tinggi terbaik menurut lembaga survey Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud). Selain itu juga kota Malang merupakan kota yang sejuk karena di kelilingi oleh pegunungan-pegunungan sehingga tidak jarang banyak para wisatawan domestik maupun mancanegara sering berlibur ke kota Malang. Bukan hanya di tunjang dari hawanya yang sejuknya saja melainkan kota ini juga mempunyai tempat-tempat wisata yang indah dan masih banyak lagi keunggulan yang di tawarkan dari kota ini sendiri.

Menyikapi peluang yang ada, maka pembangunan diarahkan lebih pada sektor jasa dengan subsektor andalan yang merupakan kota pendidikan dan pariwisata, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang. Perkembangan populasi penduduk yang tiap tahunnya terus bertambah maka perlu di kembangkan pembangunan sarana prasaranan jalan, jembatan, peningkatan kapasitas terminal, bandara dan stasiun, guna memperlancar aktivitas transportasi yang ingin di lakukan dikarenakan menjadi pusat distribusi dari warga Kota Malang sendiri maupun para wisatawan yang ingin berdatangan. Di era otonomi sekarang ini, dimana daerah diberi peluang untung mengatur rumah tangganya sendiri, dimanfaatkan juga oleh Pemkot Malang serta para *staceholder* guna mengelola secara lebih optimal potensi kota ini sendiri, yang oleh karena itu memperhatikan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan angkutan umum merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi daerah, oleh karena itu pengelola angkutan umum perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Aturan yang menjadi dasar terhadap implementasi angkutan umum kota Malang adalah Peraturan daerah kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan bermotor Umum, aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah ( PERDA ) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum.

Untuk sektor transportasi, dalam urusan perhubungan termasuk lalu lintas dan angkutan jalan di serahkan ke daerah, di mana dalam implementasinya di perlukan pedoman teknis, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan. Transportasi di kota Malang yang di dukung oleh setidaknya yaitu angkutan umum dan angkutan online yang merupakan objek penelitian ini.

Pengertian transportasi sendiri merupakan alat yang di pergunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan, atau definisi arti dari kata transportasi yang lainnya yaitu memindahkan makhluk hidup baik itu manusia, hewan, tumbuhan ataupun barang dari tempat asalnya ketempat tujuan yang di inginkan dengan menggunakan suatu alat yang dapat dikendalikan oleh makhluk hidup atau mesin.

Mengacu pada peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2006, Lintasan Kendaraan Umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan Orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, mempunyai asal dan tujuan, perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal yang terikat dalam trayek.

Penelitian ini di fokuskan kepada dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya perselisihan antara angkutan umum dan angkutan online, karena status dan hukum angkutan online untuk mengambil penumpang, tanpa adanya izin dari Pemerintah dan Dinas Perhubungan. Alasan di pilihnya angkutan karena angkutan merupakan elemen penting

dalam perekonomian, sebab berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di Kota Malang.

Kebijakan yang akan di jadikan acuan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Oleh karena itu penelitian ini di beri judul “Konflik Sosial Angkutan Umum Terhadap Perkembangan Moda Transportasi Online Di Kota Malang”.

Globalisasi yang disertai intensifikasi dan ekstensifikasi kompetisi membuat layanan transportasi publik tak lagi sederhana. Kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat amat dibutuhkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar terlepas dari konflik, guna kebutuhan masyarakat banyak.

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi dan mengevaluasi bagaimana proses penyelenggaraan angkutan online dan angkutan umum di dalam trayek dalam hal ini sesuai dengan regulasi yang dipakai dalam ruang lingkup pemerintah Kota Malang, serta adakah masalah dan isu-isu yang menyertai pelaksanaan tersebut guna menghindari konflik sosial yang terjadi antara pihak angkutan umum dan angkutan online.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas, penulis telah merumuskan masalah-masalah yang ingin diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apa penyebab konflik sosial yang terjadi antara angkutan umum dan angkutan online di Kota Malang.?
2. Bagaimana resolusi konflik antar angkutan umum dan angkutan online di Kota Malang.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumus masalah tersebut maka dapat ditetapkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mnggambarkan konflik sosial yang terjadi antara angkutan umum dan angkutan online di kota Malang.
2. Untuk menggambarkan resolusi konflik yang terjadi antara angkutan umum dan angkutan online di Kota Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang optimal pada hasil penelitian ada dua hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis, setidaknya dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini jelas menambah wawasan peneliti yang merupakan mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik Universitas Merdeka Malang yang pada materi kuliah sebelum-sebelumnya sangat erat kaitannya dengan judul yang akan di ambil karena judul tersebut mengacu pada proses implementasi dan kebijakan. Penelitian ini juga merupakan pengalaman yang baru, sehingga menambah wawasan pemikiran bagi penulis agar lebih kritis dalam menyikapi persoalan sosial yang ada karena berkesempatan melihat langsung kondisi di lapangan dan juga dapat berkesempatan langsung melakukan komparasi antara teori-teori dalam mata perkuliahan dengan kondisi ril di lapangan.

b. Bagi Program studi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang Program studi dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meneliti secara langsung apa yang sudah terjadi di lapangan, sehingga sekembalinya dari lokasi penelitian, mahasiswa tersebut telah memiliki pengalaman dengan temuan fakta-fakta baru yang tentu berguna bagi program studi. selain itu, program studi dapat mengevaluasinya agar dapat bekerja sama dengan instansi tempat pengambilan data untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan, sehingga dapat lebih di kembangkan dan dapat di jadikan pula sebagai referensi untuk penelitian yang sama ataupun sejenisnya.